

PAKET STIMULUS EKONOMI TAHAP II

Untuk melindungi daya beli masyarakat, dunia usaha dan stabilisasi ekonomi Pemerintah Indonesia kembali memberikan stimulus ekonomi tahap II sebesar Rp24,4T yang terdiri dari diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan social, bantuan subsidi upah, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.

Diskon Transportasi

Insentif pajak ini bertujuan untuk mendorong mobilitas masyarakat, meningkatkan aktivitas sektor transportasi dan pariwisata, serta menjaga momentum dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2025. Pemerintah menanggung sebagian PPN yang seharusnya dibayarkan oleh penumpang, sehingga harga tiket pesawat lebih murah dan terjangkau. Insentif PPN DTP berlaku untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi domestik pada masa libur sekolah. Pada periode libur sekolah ini, pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik, yang berlaku mulai 5 Juni 2025 hingga 31 Juli 2025.

Diskon Tarif Tol

Insentif ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, dan memperlancar mobilitas selama libur

panjang dengan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% dengan target penerima sebanyak 110 juta pengendara sebesar Rp 0,65 T (Non APBN). Diskon tersebut diberikan dalam 3 periode yaitu saat Idul Adha pada tanggal 6 hingga 9 Juni 2025, libur sekolah pada tanggal 27 hingga 29 Juni 2025 serta saat akhir libur sekolah pada tanggal 11 hingga 13 Juli 2025.

Penebalan Bantuan Sosial

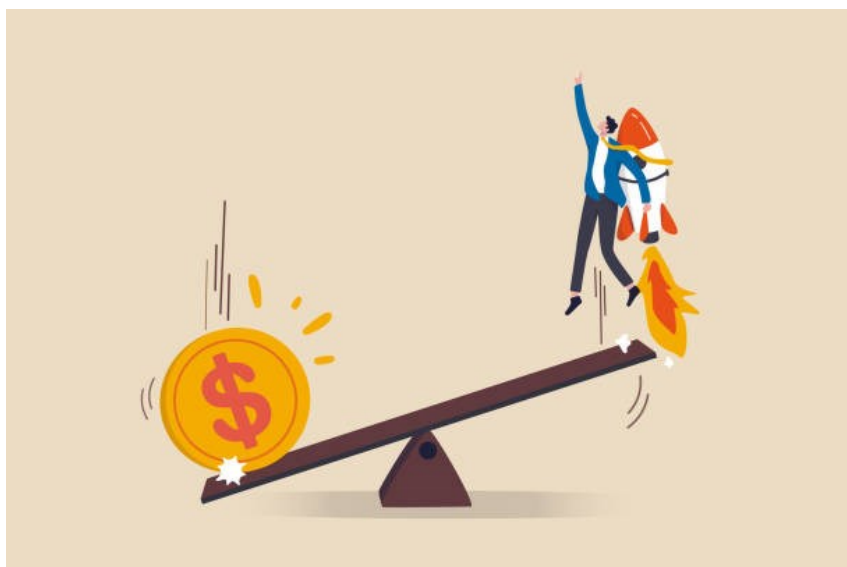
Salah satu upaya untuk memitigasi risiko dampak perekonomian global dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di triwulan ke II adalah melalui pelaksanaan kebijakan penebalan bansos. Penebalan bansos tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian tambahan bansos melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako untuk 2 (dua) bulan (periode bulan Juni-Juli) yang diberikan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran manfaat sebesar Rp200.000,-/bulan serta dilakukan dalam 1 (satu) kali penyaluran pada bulan Juni. Dengan adanya penebalan bansos kartu sembako tersebut, diharapkan akan mampu untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin/rentan dari adanya dampak risiko perekonomian global serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan II.

Bantuan Subsidi Upah

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 dari BPJS Ketenagakerjaan resmi diluncurkan untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga pokok. Pemerintah memberikan BSU kepada pekerja/buruh dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan. Sasaran penerima BSU adalah 17,3 juta dengan gaji \leq 3,5 juta atau UMP/Kab/Kota dan kepada 565 ribu guru honorer. Program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi pekerja dan meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perpanjangan Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Insentif ini bertujuan untuk memberikan keringanan pembayaran iuran JKK pada program jaminan social ketenagakerjaan untuk jangka waktu tertentu bagi Perusahaan industry padat karya tertentu dengan tetap memberikan perlindungan bagi Pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Keringanan iuran JKK tersebut diberikan sebesar 50% selama 6 bulan yaitu dari bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Juli 2025 bagi Pekerja Sektor Padat Karya senilai Rp 0,2 Triliun (Non APBN).



REALISASI APBN

s.d. 31 Mei 2025

Pendapatan Negara **Rp995,3 T**
(33,1% target)

Antara lain:

Penerimaan Pajak **Rp683,3 T**
(31,2% target)

Kepabeanan dan Cuka **Rp122,9 T**
(40,7% target)

PNBP **Rp188,7 T**
(36,7% target)

Belanja Negara **Rp1.016,3 T**
(28,1% pagu)

Belanja K/L **Rp325,7 T**
(28,1% pagu)

Belanja non-K/L **Rp368,5 T**
(23,9% pagu)

Transfer ke Daerah **Rp322,0 T**
(35,0% alokasi)

Pembiayaan Anggaran **Rp324,8 T**
(52,7% target)

Antara lain:

Pembiayaan Utang **Rp349,3 T**
(45,0% target)

Pembiayaan Investasi **Rp(24,6) T**
(15,4% alokasi)

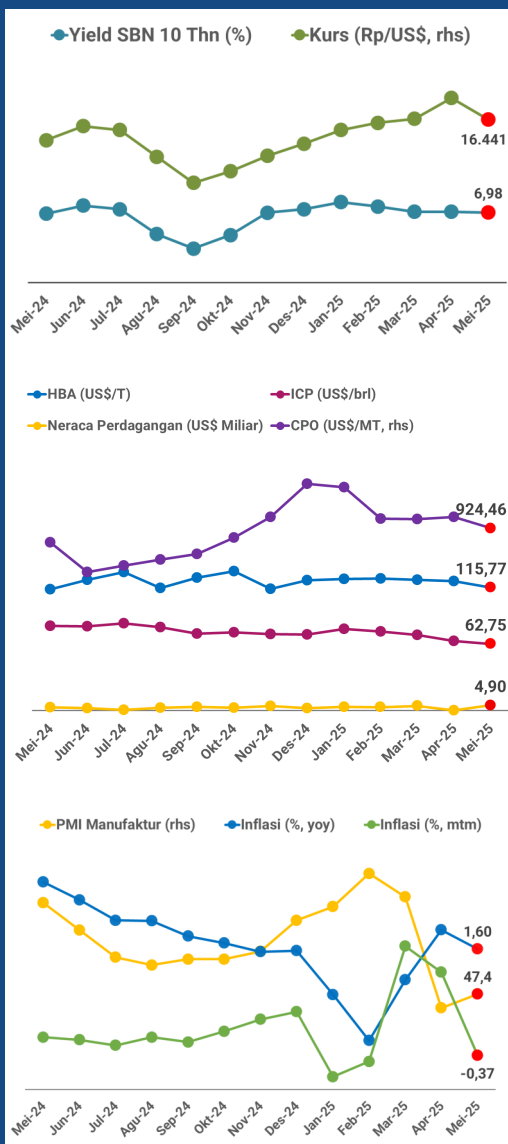
Defisit APBN

Rp21,0 T
0,09% PDB

Surplus Keseimbangan Primer

Rp192,1 T

LEADING INDICATORS YANG BERPENGARUH TERHADAP POSTUR APBN



Sektor Riil

Sektor riil pada Mei 2025 menunjukkan pemulihan terbatas. Inflasi tahunan menurun ke 1,60% (yoy) dari 1,95% pada April, seiring penurunan harga pangan pasca-Ramadan, tercermin dari deflasi bulanan sebesar -0,37% (mtm). Di sisi lain, PMI Manufaktur pada Mei 2025 naik tipis ke 47,4 dari 46,7 pada April, namun masih berada di zona kontraksi. Aktivitas industri masih tertekan akibat lemahnya permintaan ekspor dan ketidakpastian global, meskipun beberapa subsektor mulai menunjukkan perbaikan didukung permintaan domestik.

Sektor Eksternal

Sektor eksternal Indonesia pada Mei 2025 mencerminkan pelemahan signifikan pada harga komoditas utama. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) kembali turun ke US\$62,75/barel, level terendah dalam dua tahun terakhir, dipicu oleh kekhawatiran perlambatan ekonomi global dan meningkatnya pasokan dari negara produsen utama. Harga Batubara Acuan (HBA) juga menurun ke US\$115,77/ton, seiring meredanya permintaan dari India dan Tiongkok pasca musim dingin. Harga CPO juga terkoreksi menjadi US\$924,46/MT akibat tingginya stok global dan moderasi permintaan. Dilain sisi, neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar US\$4,90 miliar didukung dengan ekspor produk pertanian dan barang manufaktur yang kuat pada Mei 2025.

Sektor Keuangan

Sektor keuangan domestik mulai stabil pada Mei 2025. Nilai tukar rupiah menguat tipis ke Rp16.441/US\$, setelah sebelumnya mencapai titik terlemah pada April 2025 sebesar Rp16.820/US\$, seiring meredanya tekanan global dan sentimen positif terhadap prospek pertumbuhan domestik. Imbal hasil SBN 10 tahun tercatat sedikit menurun ke 6,98%, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter yang lebih moderat. Bank Indonesia tetap menjaga suku bunga acuan untuk mendukung stabilitas nilai tukar dan menjaga daya tarik aset domestik.

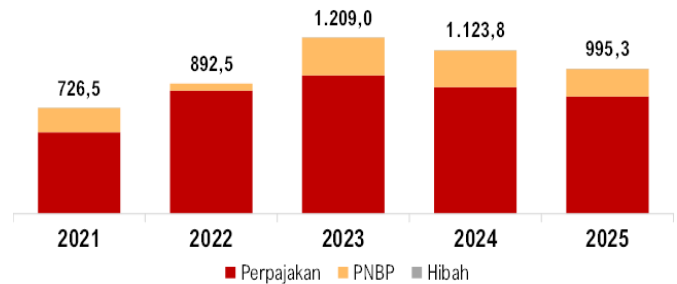
PENDAPATAN NEGARA

KINERJA PENDAPATAN NEGARA MENCAPAI 33,1% DARI TARGET APBN 2025

Realisasi pendapatan negara sampai dengan Mei 2025 mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen terhadap target APBN 2025. **Kinerja penerimaan perpajakan mencapai Rp806,2 triliun atau 32,4 persen dari target APBN 2025.** Dari sisi komponen, kinerja penerimaan pajak sampai dengan Mei 2025 mencapai Rp683,3 triliun atau 31,2 persen dari APBN 2025. Secara akumulatif, penerimaan pajak dipengaruhi penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas domestik. Selain itu, dampak pemberlakuan tarif efektif rata-rata serta peningkatan restitusi PPh Badan dan PPN turut mempengaruhi penerimaan pajak di awal tahun.

Sementara itu, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mampu mencapai Rp 122,9 triliun atau 40,7 persen dari target APBN. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh (1) penurunan tarif efektif rata-rata akibat penurunan BM komoditas utama serta peningkatan utilitas FTA, (2) kenaikan CPO dan kebijakan relaksasi ekspor tembaga, serta (3) kebijakan pelunasan CHT dengan tidak adanya relaksasi pembayaran pita cukai 3 bulanan di tahun 2025.

Pendapatan Negara (Rp T)



KINERJA PNPB S.D 31 MEI 2025 DIDUKUNG OLEH PENDAPATAN SDA DAN PNPB K/L

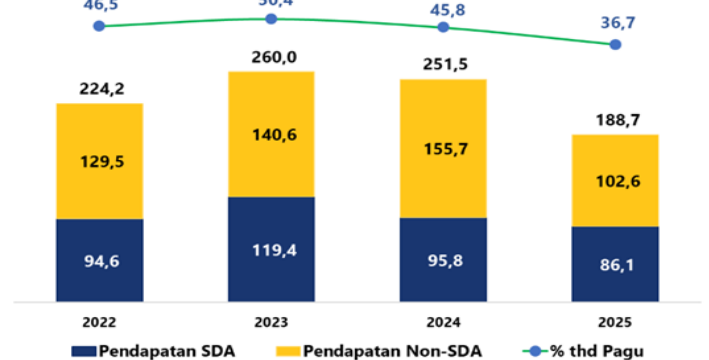
Realisasi PNPB sampai dengan 31 Mei 2025 mencapai Rp188,7 triliun (36,7% dari APBN 2025). Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA) yang menyumbang 45,6% dari total realisasi PNPB s.d 31 Mei 2025. Sementara itu, capaian tertinggi diperoleh dari PNPB K/L yang mencapai 54,8% dari target APBN 2025.

Realisasi Pendapatan SDA Migas mencapai Rp39,8 triliun (32,9% dari APBN 2025). Realisasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan ICP dampak berlakunya tarif baru perdagangan AS dan penurunan proyeksi tingkat pertumbuhan perekonomian dunia tahun 2025 oleh OPEC dan IMF. Rata-rata ICP periode Januari - Mei 2025 mencapai sebesar US\$70,1/barel (2024: US\$81,7/barel). Untuk *lifting* migas periode Januari - April 2025, rata-rata *lifting* minyak bumi sebesar 572,7 ribu barel/hari (2024: 560,9 ribu barel/hari) dan rata-rata *lifting* gas bumi mencapai sebesar 969,4 ribu barel/hari (2024: 918,2 ribu barel/hari).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp46,3 triliun (47,7% dari APBN 2025). Realisasi tersebut utamanya didorong oleh pendapatan SDA pertambangan mineral sebesar Rp43,5 triliun (49,7% dari APBN 2025) terutama berasal dari penerimaan royalti batubara. Kinerja penerimaan ini dipengaruhi oleh tren moderasi Harga Batubara Acuan (HBA) serta penurunan volume produksi batubara, yang disebabkan oleh berkurangnya konsumsi batubara dalam negeri. Realisasi pendapatan SDA kehutanan mencapai sebesar Rp2,2 triliun (38,3% dari APBN 2025) terutama disumbang dari pembayaran Dana Reboisasi (DR) & Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Kinerja penerimaan ini terpengaruh oleh penundaan pembayaran oleh para wajib bayar sebagai dampak dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025. Adapun realisasi pendapatan SDA kelautan dan perikanan mencapai sebesar Rp0,3 triliun (19,8% dari APBN 2025) berasal dari Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan. Selanjutnya, realisasi pendapatan SDA panas bumi telah mencapai sebesar Rp0,3 triliun (15,2% dari APBN 2025) meskipun terdapat peningkatan biaya operasi Pengusaha Panas Bumi dalam rangka penambahan kapasitas produksi.

Realisasi Pendapatan KND mencapai sebesar Rp10,9 triliun (12,1% dari APBN 2025). Realisasi Pendapatan KND berasal dari pembayaran dividen Perbankan, yaitu dividen interim BRI tahun buku 2024. Sampai dengan 31 Mei 2025, tidak terdapat tambahan setoran Pendapatan KND seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara.

Realisasi PNPB s.d 31 Mei, 2022-2025 (triliun rupiah)



Realisasi PNPB Lainnya mencapai Rp59,4 triliun (46,5% dari APBN 2025). Realisasi tersebut utamanya disumbang oleh PNPB KL sebesar Rp47,2 triliun (54,8% dari APBN 2025) dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan BUN atas pendapatan pengelolaan rekening negara dan pendapatan jasa komunikasi dan informatika. Kinerja PNPB lainnya ini juga disumbang oleh Pendapatan Penjualan Hasil Tambang yang terealisasi sebesar Rp10,6 triliun (28,4% dari APBN 2025) dipengaruhi oleh fluktuasi HBA dan volume produksi batubara. Sementara itu, Pendapatan *Domestic Market Obligation* (DMO) s.d 31 Mei 2025 telah mencatatkan penerimaan sebesar Rp1,7 T (37,0% dari APBN 2025).

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp32,3 triliun (41,4% dari APBN 2025). Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan BLU Sawit sebesar Rp6,8 triliun (51,2% dari APBN 2025), yang dipengaruhi oleh perubahan tarif Pungutan Ekspor (PE) atas CPO dan produk turunannya sesuai dengan PMK Nomor 30 Tahun 2025, serta Pendapatan BLU Nonsawit sebesar Rp25,5 triliun (39,4% dari APBN 2025) dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan jasa layanan rumah sakit dan pendapatan jasa layanan pendidikan.

HIBAH

Penerimaan hibah mencapai Rp0,4 triliun, dipengaruhi baik dari penerimaan hibah dalam negeri maupun hibah luar negeri. Hibah dalam negeri terutama dari pemerintah daerah, sedangkan hibah luar negeri terutama dari skema terencana multilateral.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Mei tahun 2025 mencapai Rp1.016,3 T (28,1% dari APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 T), terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp694,2 T (25,7% dari APBN 2025 sebesar Rp2.701,4 T) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp322,0 T (35,0% dari APBN 2025 Rp919,9 T).

BPP SAMPAI DENGAN MEI 2025 DIMANFAATKAN UTAMANYA UNTUK PENYALURAN PROGRAM BANSOS, PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN/TNI/POLRI, PENYALURAN BOS (KEMENAG), DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH LAINNYA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp694,2 T tersebut terdiri dari realisasi Belanja K/L dan Belanja Non-K/L. Realisasi Belanja K/L mencapai Rp325,7 T (28,1% dari APBN 2025) dan dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako, bantuan iuran PBI JKN, serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri. Selanjutnya, **Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp368,5 T** (23,9% dari APBN 2025) serta dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.

Adapun penjelasan kinerja Belanja K/L sampai dengan Mei 2025 berdasarkan jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

Realisasi Belanja Pegawai K/L mencapai Rp123,9 T (40,5% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp81,2 T dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp42,7 T. Realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh belanja tunjangan pendidik non PNS pada Kemendikdasmen dan Kemendiksayntek.

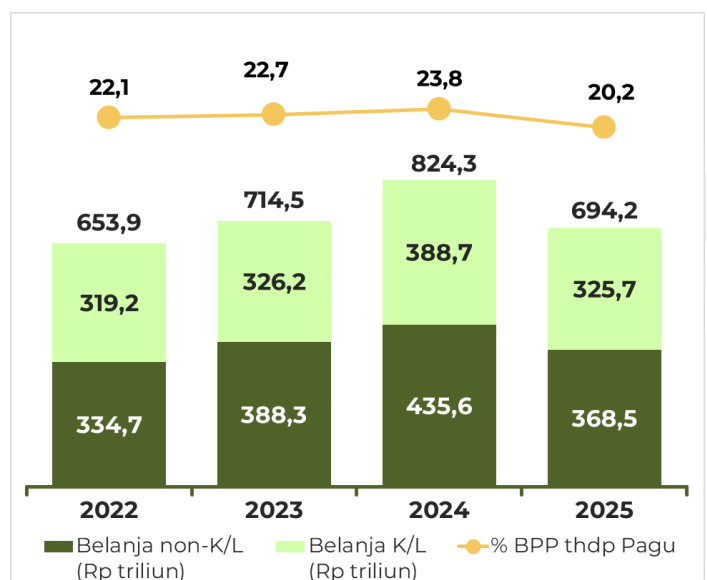
Realisasi Belanja Barang K/L mencapai Rp97,4 T (20,1% dari APBN 2025). Penurunan belanja barang utamanya disebabkan oleh pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang cukup besar. Secara rinci realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pelayanan K/L kepada masyarakat antara lain penyaluran BOS, operasional dan layanan K/L, pelayanan keamanan lalu lintas, biaya distribusi bantuan, dan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal; (2) pemeliharaan aset negara antara lain pemeliharaan sarpras dan BMN, harwat alutsista /nonalutsista, dan harwat sistem IT; (3) layanan masyarakat melalui BLU antara lain Subsidi Bio Diesel, pelayanan kesehatan masyarakat, dan penyaluran LPDP; (4) barang diserahkan Ke masyarakat/Pemda antara lain penyaluran MGB, infrastruktur EBT dan konservasi energi; serta preservasi jalan dan jembatan.

Realisasi Belanja Modal K/L mencapai Rp55,6 T (23,7% dari pagu APBN 2025), yang dipengaruhi antara lain antara lain oleh pengadaan peralatan dan mesin. Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan untuk *ground breaking* dan *progress* fisik proyek-proyek infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan yang antara lain meliputi: (1) modernisasi peralatan pertahanan, keamanan, peralatan Kesehatan, pendidikan, dan keselamatan penerbangan; (2) pengadaan sarpras pada Kejaksaan; (3) pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, bendungan, irigasi oleh Kementerian PU; (4) pembangunan infrastruktur minyak dan gas oleh Kementerian ESDM; (5) pembangunan infrastruktur konektivitas darat, laut, udara dan kereta api oleh Kemenhub; (6) pembangunan dan perbaikan gedung, rumah dinas, dan prasarana pendidikan.

Realisasi Bantuan Sosial K/L mencapai Rp48,8 T atau 36,2% dari pagu APBN 2025. Sampai dengan akhir Mei 2025, realisasi belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta KPM, (2) penyaluran bantuan kartu sembako bagi 18,3 juta KPM, (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) penyaluran bantuan PIP bagi 4,1 juta siswa dan bantuan KIP Kuliah bagi 893,8 ribu mahasiswa; (5) pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dan bantuan permakanan bagi yatim piatu, lansia dan penyandang disabilitas serta penanganan korban bencana.

Realisasi Belanja Non-K/L sampai dengan Mei Tahun 2025 utamanya dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi. Realisasi pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp82,7 T (47,8% dari APBN 2025). Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp213,1 T (38,5% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp66,1 T (21,5% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Subsidi terdiri atas: (1) Subsidi Energi sebesar Rp58,8 T, untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 5,8 juta KL, LPG Tabung 3 Kg sebesar 2,8 juta MT, dan listrik bersubsidi untuk 42,1 juta pelanggan; dan (2) Subsidi Non-Energi sebesar Rp7,3 T, dengan manfaat penyaluran untuk Subsidi Bunga KUR kepada 1,9 juta debitur dan plafon penyaluran KUR sebesar Rp110,1 T, serta penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 3,1 juta ton. Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp849,6 M (0,2% dari APBN 2025), antara lain dimanfaatkan untuk operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (SKK Migas dan Kawasan Bintan Karimun) serta bantuan kemasyarakatan presiden dan wakil presiden.

Realisasi BPP s.d. 31 Mei 2022-2025
(triliun rupiah)



BELANJA PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH

“Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) s.d. 31 Mei 2025 utamanya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan layanan publik di daerah, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.”

Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Mei 2025 mencapai Rp322,0 T (35,0% terhadap APBN 2025), menunjukkan peningkatan sebesar 0,3% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dalam memenuhi persyaratan penyaluran TKD.

Realisasi Penyaluran TKD s.d. 31 Mei, 2022-2025
(triliun rupiah)



Penyaluran DBH s.d. 31 Mei 2025 telah terealisasi sebesar Rp49,1 T (25,5% terhadap APBN 2025). Realisasi DBH tersebut terdiri dari DBH Pajak Rp15,7 T, DBH SDA Rp32,8 T, serta DBH Perkebunan Sawit Rp0,5 T. Penggunaan DBH pada tahun 2025 diarahkan antara lain untuk mendukung kebijakan DBH earmarked bagi sektor-sektor prioritas yang didesain lebih luas dan fleksibel sesuai peraturan perundang-undangan.

Realisasi penyaluran DAU s.d. 31 Mei 2025 mencapai Rp189,6 T (42,4% terhadap APBN 2025), lebih tinggi sebesar 1,7% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran DAU Block Grant sebesar Rp179,3 T yang utamanya digunakan untuk pembayaran gaji ASN Daerah

dan DAU Specific Grant sebesar Rp10,3 T untuk bidang pendidikan, kesehatan, pendanaan kelurahan. Sementara itu, dukungan DAU Specific Grant untuk pengajian formasi PPPK yang diangkat pada tahun 2025 belum terdapat realisasi penyaluran.

Realisasi penyaluran DAK s.d. 31 Mei 2025 sebesar Rp49,4 T (26,7% terhadap APBN 2025). Realisasi tersebut sebagian besar berasal dari penyaluran DAK Nonfisik (a.l. Dana BOS sebesar Rp26,0 T, Dana BOP PAUD sebesar Rp2,0 T, Dana TPG ASND sebesar Rp14,8 T, serta Dana BOK dan BOKB sebesar Rp4,7 T). Sementara itu, DAK Fisik telah terealisasi sebesar Rp0,4 T dan Hibah kepada Daerah telah terealisasi sebesar Rp6,5 M.

Dana Otsus Aceh dan Provinsi-provinsi di wilayah Papua tahun 2025 diarahkan untuk penurunan kemiskinan, perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta mendukung capaian rencana induk percepatan pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Selanjutnya, s.d. 31 Mei 2025 realisasi penyaluran Dana Otsus Aceh dan Provinsi-provinsi di wilayah Papua mencapai Rp1,8 T (10,5% terhadap APBN 2025)

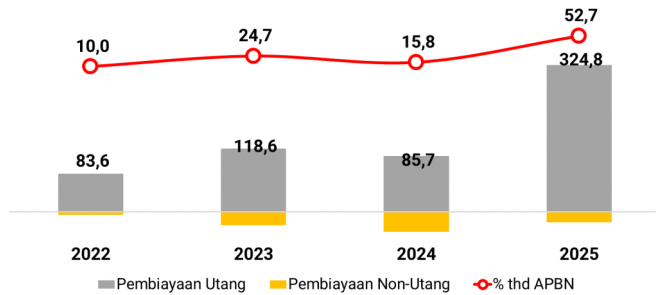
Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta pada tahun 2025 diarahkan untuk: (1) penurunan tingkat kemiskinan; (2) pemberdayaan masyarakat dan UMKM; dan (3) peningkatan penyediaan layanan dasar publik daerah. Selanjutnya, s.d. 31 Mei 2025 realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta mencapai Rp150,0 M (12,5% terhadap APBN 2025).

Dana Desa pada tahun 2025 difokuskan antara lain untuk: (1) penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi sebesar 15% dari pagu yang diterima setiap desa; (2) penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting; (3) dukungan program ketahanan pangan; dan (4) operasional pemerintah desa paling tinggi sebesar 3% dari pagu yang diterima setiap desa. Realisasi penyaluran Dana Desa s.d. 31 Mei 2025 mencapai Rp30,6T (43,1% terhadap APBN 2025).



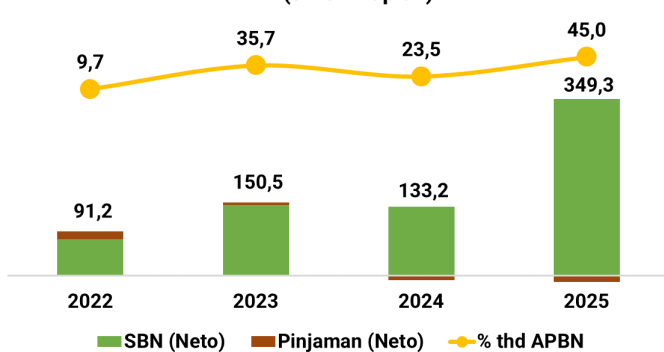
PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan Anggaran s.d 31 Mei, 2022-2025
(triliun Rupiah)



Pembiayaan anggaran sampai dengan Bulan Mei 2025 terealisasi sebesar Rp324,8 T atau 52,7% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp616,2 T. Realisasi ini disumbang dari realisasi pembiayaan utang dan realisasi pembiayaan non-utang.

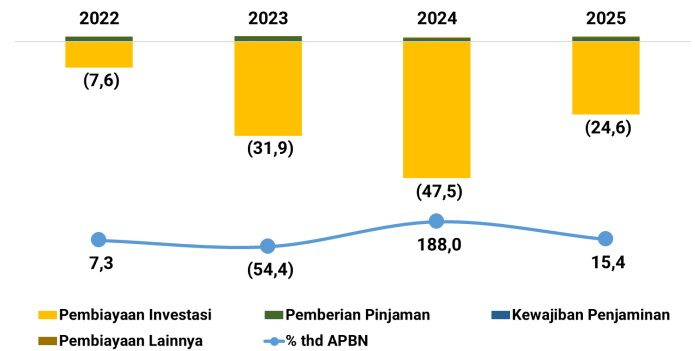
Realisasi Pembiayaan Utang s.d 31 Mei, 2022-2025
(triliun Rupiah)



Pada pos pembiayaan utang, sampai dengan Bulan Mei 2025 secara neto terealisasi sebesar Rp349,3 T atau 45,0% dari APBN 2025. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari realisasi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp361,7 T dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp12,4 T. Tanda negatif pada pinjaman (neto) menunjukkan bahwa pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar daripada penarikan pinjaman.

Selanjutnya, terkait dengan realisasi pinjaman (neto) dimaksud, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (neto) terdapat realisasi sebesar negatif Rp2,6 T yang berasal dari penarikan PDN (bruto) sebesar Rp0,5 T dan pembayaran cicilan pokok PDN sebesar negatif Rp3,0 T. Sementara pada Pinjaman Luar Negeri (PLN) (neto) terdapat realisasi sebesar negatif Rp9,8 T, yang berasal dari penarikan PLN (bruto) sebesar Rp30,9 T dan pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp40,7 T.

Realisasi Pembiayaan Non-Utang s.d 31 Mei, 2022-2025
(triliun Rupiah)



Sementara itu, dari pos pembiayaan non-utang, realisasi sampai dengan Bulan Mei 2025 sebesar negatif Rp24,6 T atau 15,4% dari APBN 2025, terdiri dari realisasi pembiayaan investasi sebesar negatif Rp26,3 T, realisasi pemberian pinjaman sebesar Rp1,5 T, dan realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rp0,3 T.

Realisasi pembiayaan investasi sebesar negatif Rp26,3 T tersebut berasal dari penerimaan kembali investasi berupa penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah sebesar Rp1,5 T, dan penerimaan pembiayaan investasi Pemerintah non-permanen sebesar Rp0,2 T, penerimaan pembiayaan atas pengembalian dana cadangan pemerintah pada BLU sebesar Rp0,01 T, investasi pemerintah oleh BUN (non-permanen) sebesar negatif Rp28,1 T yang terdiri dari investasi pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar negatif Rp11,5 T dan investasi pada OIP Perum BULOG sebesar negatif Rp16,6 T untuk program penyerapan 3 juta ton beras/setara beras.

Sampai dengan Bulan Mei 2025, **pemberian pinjaman telah terealisasi (neto) sebesar Rp1,5 T**. Realisasi tersebut berasal dari realisasi pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) sebesar negatif Rp0,6 T, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar Rp2,0 T, serta penerimaan cicilan pengembalian dana antisipasi untuk pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo sebesar Rp0,1 T.

Selanjutnya, **pos pembiayaan lainnya telah terealisasi sebesar Rp0,3 T** yang berasal dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA). HPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset bekas

EVENT APBN

IMF JAJAKI RENCANA KERJASAMA DENGAN DIREKTORAT JENDRAL ANGGARAN

Penyelenggara	:	Direktorat Jenderal Anggaran
Waktu dan Tempat	:	Gedung Sutikno Slamet lantai 4
Narasumber	:	Perwakilan Pegawai DJA, Division Chief Fiscal Affairs Department, IMF (Sailendra Pattanayak), Senior Expert IMF (Ms. Majdeline El Rayess)
Peserta	:	Selasa, 11 Mei 2025

Direktorat Jenderal Anggaran menerima kedatangan perwakilan IMF pada tanggal 11 Mei 2025 bertempat di Ruang Rapat lantai 4, Gedung Sutikno Slamet. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut rangkaian lokakarya yang dilaksanakan secara maraton oleh perwakilan IMF pada 28–30 April 2025. Pada pertemuan tersebut yang dibuka oleh Arief Masdi (analisis anggaran ahli Madya, DJA), perwakilan DJA menyampaikan rencana program terkait risiko fiskal maupun yang berkaitan dengan proyeksi dan aset APBN. Sementara itu, Division Chief Fiscal Affairs Department, IMF (Sailendra Pattanayak) dan Senior Expert IMF (Ms. Majdeline El Rayess) menyampaikan apresiasi dan menginventarisasi program-program pelatihan serta melakukan sinkronisasi dengan program pelatihan di Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, sebelum menyusun rencana aksi ke depan.



PERTEMUAN DIREKTORAT JENDRAL ANGGARAN DENGAN AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD – FRENCH DEVELOPMENT AGENCY)

Penyelenggara	:	Direktorat Jenderal Anggaran
Waktu dan Tempat	:	Gedung Sutikno Slamet lantai 4
Narasumber	:	Rofyanto Kurniawan (Direktur Penyusunan APBN), Ms. H�el�ene Ehrhart,
Peserta	:	Rabu, 11 Juni 2025

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menjamu perwakilan Agence Fran aise de D veloppement (AFD – French Development Agency) di Ruang Bromo, Gedung Sutikno Slamet lantai 4 pada tanggal 11 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, dibuka melalui pemaparan perkembangan kondisi makro fiskal terkini dan postur APBN 2025 oleh Direktur Penyusunan APBN, DJA. Selanjutnya dalam diskusi yang sangat intens dilakukan dengan perwakilan DJA dan AFD terkait kondisi perekonomian global serta rambatan risikonya baik di Indonesia dan Perancis. Pertemuan tersebut merupakan wujud hubungan bilateral antar kedua negara yang hangat khususnya kerjasama di sektor ekonomi



REDAKSI

Direktorat Penyusunan APBN

Gedung Sutikno Slamet

Jl. DR Wahidin No. 1

Jakarta Pusat

Telp: (021) 3849315

Email: penyusunan.apbn@gmail.com

Ditandatangani secara elektronik

PRUDENT

Profesional, Responsif, Unggul, Dedikatif, Efisien, No Korupsi, Transparan